

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam menyokong perekonomian negara terlebih di negara berkembang, seperti Indonesia. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah devisa sektor pariwisata pada tahun 2019-2021 mencapai USD 0,54 Miliar.<sup>1</sup> Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan alam dan peluang pariwisata Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Pariwisata dapat memberikan dampak pada pembangunan dengan meningkatkan pendapatan daerah dan standar hidup dari masyarakat pedesaan maupun perkotaan, hal tersebut mendukung pernyataan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa negara. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta dari pertumbuhan pendapatan negara dan adanya lapangan kerja baru yang nantinya dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan (Tiyasmono, 2020).

Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang sejalan dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa tujuan kepariwisataan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, pengetasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perlindungan sumber daya alam, dan penyebaran budaya.<sup>2</sup> Sektor pariwisata memiliki dampak yang besar

---

<sup>1</sup> Jumlah Devisa Sektor Pariwisata 2019-2021. Badan Pusat Statistik. 2021. Retrieved 4 November 2022 from <https://www.bps.go.id/indicator/16/1160/1/jumlah-devisa-sektor-pariwisata.html>

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

terhadap perekonomian negara dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (Jamalina & Wardani, 2017). Pernyataan bahwa sektor pariwisata merupakan komoditas penyumbang devisa negara yang cukup besar didukung dengan banyaknya keragaman wisata alam dan budaya yang ada di Indonesia.

Pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara tentunya memerlukan sebuah strategi dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan perannya supaya dapat terus berkembang secara optimal. Seiring perkembangan zaman dimana masuk ke era globalisasi, dampak negatif dari perkembangan pariwisata semakin terlihat misalnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam, sosial dan budaya, serta kesenjangan perekonomian di masyarakat. Dalam hal perekonomian yang akan berdampak pada angka kemiskinan di negara, hal tersebut disebabkan salah satunya karena banyaknya intervensi modal asing yang masuk ke sektor pariwisata yang berakibat terjadinya kesenjangan ekonomi antar masyarakat dengan penanam modal (Hadiwijoyo, 2018). Apabila hal tersebut terus terjadi akan mengakibatkan tidak dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata di Indonesia. Banyaknya potensi wisata dimana penyebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia yang seharusnya menjadi sebuah peluang besar untuk dapat menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, namun realitasnya yang terjadi di Indonesia kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata belum secara optimal dilakukan.

Penurunan kualitas lingkungan dari pengelolaan pariwisata juga menjadi tugas bagi pemerintah untuk dapat mencari solusi agar permasalahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat teratasi. Upaya yang dilakukan

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menghilangkan kesenjangan perekonomian antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta upaya dalam menjaga kualitas lingkungan, kemudian dibentuklah konsep desa wisata, mengingat Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sektor pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan dengan adanya warisan budaya yang melimpah dan ekonomi kreatif yang berkembang dengan pesat. Hal ini juga didasari karena sebagian besar destinasi wisata di Indonesia berada di pedesaan. Berdasarkan hasil pendataan potensi desa (podes) 2018 yang diterbitkan Badan Pusat Statistika (BPS) sebanyak 1.734 desa di Indonesia memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi tempat wisata dengan berbagai ciri khas yang dimiliki masing-masing desa.<sup>3</sup> Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri dengan wilayah pedesaan di Indonesia yang sebagian besar memiliki budaya yang berbeda-beda yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Desa wisata menjadi konsep dalam pengembangan wilayah pedesaan yang mengangkat kearifan lokal dari tradisi, budaya, kehidupan masyarakat desa sehari-hari, dan tata ruang desa. Konsep ini menyatukan berbagai elemen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam satu kesatuan terpadu. Desa Wisata adalah contoh nyata dari upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global. Pembentukan desa wisata melibatkan manajemen dan partisipasi aktif masyarakat, wisatawan, kemitraan, serta peningkatan pendapatan masyarakat sebagai komponen utamanya.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. (2022). Retrieved 21 November 2022, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>

Berkembangnya desa wisata berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di pedesaan melalui pengelolaan pembangunan pariwisata yang berhasil dengan mengadopsi pendekatan yang tepat untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan tentunya akan membawa nilai tambah, yaitu berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran serta tidak adanya kesenjangan pembangunan di pedesaan. Nuryanti mendefinisikan desa wisata sebagai suatu jenis integrasi yang mempertahankan identitas budaya serta tatanan kehidupan masyarakat pedesaan dengan mengakomodasikan pengunjung dengan atraksi, penginapan, dan fasilitas lainnya (Ahsani, Suryaningsih, Ma'rifah, & Aerani, 2018). Menurut Inskeep (1991) desa wisata merupakan sebuah tempat dengan identitas dan nilai tersendiri yang menarik pengunjung terhadap kehidupan tradisional di pedesaan (Hadiwijoyo, 2018).

Pengembangan dan pengelolaan desa wisata memiliki prinsip, yaitu menggunakan sarana dan prasarana masyarakat lokal untuk keuntungan masyarakat lokal itu sendiri, menyediakan ruang untuk mendorong hubungan timbal balik, dan membiarkan masyarakat lokal berpartisipasi dan menghasilkan produk wisata pedesaan (Hadiwijoyo, 2018). Pelibatan atau keterlibatan masyarakat lokal, penciptaan produk wisata yang berkualitas, dan promosi melalui pemberdayaan kelompok usaha lokal merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan pengembangan desa wisata berkelanjutan (Hadiwijoyo, 2018).

Kesejahteraan masyarakat menjadi aspek utama yang perlu ditekankan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, terutama kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wisata. Salah satu cara yang dilakukan adalah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal di desa wisata tersebut. Implementasi dari konsep desa wisata difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat memanfaatkan potensi desa yang ada seperti keindahan alam dan budaya yang asli dari desa tersebut (Ahsani, Suryaningsih, Ma'rifah, & Aerani, 2018).

Pemberdayaan masyarakat dilakukan bertujuan agar masyarakat sekitar dapat peka terhadap permasalahan di lingkungan wisata serta mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut meskipun dengan keterbatasan dan kemampuan yang mereka miliki (Hadiwijoyo, 2018). Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah memiliki peran dalam hal tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) dalam Rencana Strategis (Renstra) mengungkapkan beberapa hambatan atau permasalahan yang muncul dalam pengembangan pariwisata di Indonesia yang kompleks, diantaranya yaitu permasalahan pengembangan destinasi wisata, permasalahan pengembangan pemasaran pariwisata, permasalahan pengembangan industri pariwisata, permasalahan kelembagaan kepariwisataan, dan permasalahan pembangunan ekonomi kreatif.<sup>4</sup> Permasalahan pariwisata yang kompleks dan dengan minimnya pengetahuan serta pengalaman dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sehingga masih diperlukan bantuan serta arahan.

---

<sup>4</sup> Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved 21 November 2022, from <https://eperformance.kemenparekraf.go.id/storage/media/993/RENSTRA-KEMENPAREKRAF BAPAREKRAF-2020-2024.pdf>

Pengembangan dari sektor pariwisata pun masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata dengan segala permasalahan yang kompleks tentunya tidak bisa jika hanya diselesaikan oleh pemerintah saja tanpa bantuan dari pihak lain, perlu adanya kerjasama atau *collaborative governance* yang efektif dengan para aktor/*stakeholder* lainnya. *Collaborative governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keterbatasan pemerintah dalam mengelola pariwisata sebagai langkah dalam mewujudkan perkonomian yang stabil di masyarakat. *Collaborative governance* merupakan strategi baru yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai strategi untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan sektor kepariwisataan. Pemerintah harus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai aktor non-pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pariwisata.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kelembagaan kepariwisataan merujuk pada sebuah entitas yang terdiri dari berbagai elemen yang dipertemukan secara terstruktur, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, yang juga mencakup sumber daya manusia, peraturan, dan mekanisme operasional yang berkelanjutan dengan tujuan mencapai perkembangan sektor pariwisata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Konsep pengelolaan pariwisata yang ideal dalam mencapai pembangunan optimal harus memastikan bahwa semua sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dapat bermanfaat untuk masa depan dimanfaatkan secara efektif. Dalam konsep ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu (1) aspek ekonomi, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan strategi untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang; (2) aspek sosial, yang mencakup peran manusia dalam mendukung komunitas melalui interaksi, hubungan, dan ketergantungan; (3) aspek lingkungan, yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan sering kali menjadi perhatian utama ketika berbicara mengenai *sustainable design* (Avoyan, Tatenhove, & Toonen, 2017). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti partisipasi, keterlibatan para pelaku kepentingan, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, pemenuhan tujuan masyarakat, daya dukung, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, serta promosi (Ikeanyibe, 2018).

*Collaborative governance* merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam menangani berbagai permasalahan atau isu-isu publik di masyarakat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dari pengembangan pariwisata melalui *collaborative governance* yaitu memaksimalkan potensi desa wisata yang menjadi kekuatan utama dalam sektor kepariwisataan di Indonesia. Keterlibatan pihak non-pemerintah dalam membangun atau mengelola pariwisata tentunya akan membuat pelaksanaan dari kebijakan pemerintah dalam

kepariwisataan akan lebih optimal dengan adanya hubungan kolaborasi yang dijalankan tersebut.

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi masyarakat dan swasta dapat juga turut serta dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pengembangan pariwisata diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan, seperti akses yang mudah dan pengalaman yang menarik. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah berkembang pesat di masa revolusi industri 4.0 yang kemudian mendorong berbagai sektor agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada, terutama sektor pariwisata dan industri kreatif yang menjadi salah satu pendorong pembangunan dan perekonomian negara. Strategi dalam sektor pariwisata dengan mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan *digital tourism*. *Digital tourism* menjadi strategi yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan melalui promosi destinasi dan potensi wisata secara digital/*online*.

Pariwisata dengan adanya digitalisasi akan menjangkau lebih banyak wisatawan dan pariwisata akan terus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi, dalam rangka menjaga daya saing dan meningkatkan kualitas layanan, sektor pariwisata perlu terus mengintegrasikan digitalisasi dalam strategi dan operasinya. Dengan begitu akan membantu memenuhi ekspektasi wisatawan modern dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan.

Penggunaan teknologi informasi dalam sektor pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang bisnis bagi penduduk setempat (Agung, 2015). Di masyarakat, penggunaan teknologi informasi akan dapat mempermudah akses informasi terkait destinasi wisata dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya daerah. Integrasi teknologi informasi dianggap sebagai strategi pemasaran dalam sektor pariwisata yang dapat memberikan keuntungan bagi penyedia layanan dan pengelola pariwisata (Hamid, et al., 2021).

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi besar yang memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata lebih lanjut. Hal ini terutama relevan mengingat saat ini tiap-tiap provinsi di Indonesia berlomba-lomba menawarkan potensi pariwisatanya. Dalam rangka mewujudkan target menjadi destinasi wisata unggulan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berusaha meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki, dimana DIY menawarkan banyak potensi wisata yang dimiliki seperti wisata alam yang khas dengan keindahan pantai, pegunungan dan bukit, serta berbagai jenis kebudayaan khas dari Yogyakarta (Jamalina & Wardani, 2017).

Salah satu kabupaten di provinsi DIY yang sedang gencar memasarkan pariwisata saat ini adalah Kabupaten Gunungkidul. Beragam wisata yang ditawarkan di Gunungkidul mulai dari wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya membuat daerah tersebut berpeluang besar untuk terus berkembang dan membangun wilayah serta masyarakatnya dengan konsep desa wisata. Banyaknya

kekayaan alam yang dimiliki menjadi sebuah potensi yang menjanjikan, Gunungkidul mendapatkan penghargaan sebagai daerah pariwisata paling populer di Indonesia yang sudah dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Jamalina dan Wardani, 2017). Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul difokuskan pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu “*Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026*”.<sup>6</sup>

Keragaman wisata di Kabupaten Gunungkidul yang telah banyak memberikan manfaat untuk perekonomian terutama perekonomian di masyarakat, banyak desa wisata yang sudah berhasil dalam pengelolaan serta promosinya. Salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang telah banyak disorot karena berbagai keberhasilan yang diraih yaitu Desa Wisata Nglanggeran di Kecamatan Patuk. Desa Wisata Nglanggeran sudah banyak meraih penghargaan di kancah internasional, beberapa penghargaan tersebut yaitu meraih penghargaan ASEAN *Community Based Tourism* (CBT) award 2017 yang diselenggarakan di Singapura, mendapatkan penghargaan sebagai *Best Tourism Village* dari *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 2021<sup>7</sup>, dan pada tahun 2020 Desa Wisata Nglanggeran terpilih menjadi salah satu desa wisata digital yang dijadikan percontohan untuk desa wisata lainnya khususnya di DIY maupun

---

<sup>6</sup> Website Kabupaten Gunungkidul. Retrieved 18 November 2022 from <https://gunungkidulkab.go.id/D-947db8881fd2f1e605a1fe29a8b6aa6c-NR-100-0.html>

<sup>7</sup> Desa Wisata Nglanggeran dapat penghargaan Asean CBT. (2017). Retrieved 18 November 2022, from <https://jogja.antaranews.com/berita/344384/desa-wisata-nglanggeran-dapat-penghargaan-asean-cbt>

Indonesia untuk dapat mengembangkan desa wisata digital.<sup>8</sup> Selain itu pada tahun 2021, Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menetapkan Desa Wisata Nglanggeran sebagai desa wisata mandiri yang inspiratif.

Desa Wisata Nglanggeran di bawah pengelolaan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pemerintah yang dinilai sudah tepat dan baik dalam mengelola potensi desa wisata tersebut dapat membuat Desa Wisata Nglanggeran memiliki peluang tinggi untuk menjadi tujuan wisata dengan potensi wisata yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, sehingga dapat menarik pengunjung dan mempertahankannya pembangunan yang stabil, yang dapat menghasilkan manfaat sosial dan kesempatan kerja baru.<sup>9</sup> Adanya hubungan kerjasama antara Pokdarwis dengan *stakeholder* yang lainnya secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan potensi wisata di Desa Wisata Nglanggeran, terutama pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran. Desa Wisata Nglanggeran banyak berkolaborasi dengan para *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata seperti dari pihak pemerintah, swasta, NGO, dan akademisi.

Salah satu penunjang keberhasilan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran yaitu adanya digitalisasi. Promosi media digital Desa Wisata Nglanggeran sebagai destinasi wisata merupakan salah satu inisiatif penompang atau penunjang keberhasilan desa tersebut. Promosi dilakukan dengan situs *web* dan

---

<sup>8</sup> Kembangkan Desa Wisata Digital, Nglanggeran Tandatangani Berita Acara Serah Terima Dengan Kementerian Pariwisata - Warta Jogja. (2020). Retrieved 25 November 2022, from <https://wartajogja.co.id/kembangkan-desa-wisata-digital-nglanggeran-tandatangani-berita-acara-serah-terima-dengan-kementerian-pariwisata/>

<sup>9</sup> Menparekraf Tetapkan Nglanggeran Desa Wisata Mandiri |Republika Online. (2021). Retrieved 18 November 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/r0uaag472/menparekraf-tetapkan-nglanggeran-desa-wisata-mandiri>

media sosial (*Instagram, Twitter, Facebook, dsb*). Salah satu cara terbaik untuk mengkomodasikan digitalisasi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah dengan sepenuhnya mendigitalkan industri pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Mumtaz & Karmillah, 2021). Karena kemajuan teknologi digital membuat akses informasi bagi wisatawan menjadi mudah, cepat dan efisien, misalnya saat ingin mengetahui informasi mengenai destinasi wisata yang ingin mereka kunjungi. Potensi pertumbuhan pariwisata di desa wisata akan terpengaruhi oleh meluasnya adopsi digitalisasi pariwisata, yang diakui secara luas sebagai strategi penting untuk mempromosikan pariwisata melalui sarana digital.

Adanya *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan implementasi dari *digital tourism* dalam hal promosi desa wisata di Nglanggeran membuat Desa Wisata Nglanggeran dikategorikan sebagai desa wisata yang berhasil dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penghargaan yang telah diraih Desa Wisata Nglanggeran. Penerapan digitalisasi yang menjadi salah satu strategi pemasaran desa wisata menjadi hal menarik untuk dikaji. Keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran tentu terdapat peran dan tanggung jawab dari para aktor dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Berangkat dari hal tersebut yang kemudian penulis ingin mengkajinya lebih dalam mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi proses kolaborasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisis dampak dari digitalisasi yang dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran. Oleh karena itu, penulis

melakukan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran?

1.2.2 Bagaimana dampak digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini mengingat konteks dan rumusan masalah di atas, antara lain:

1.3.1 Mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

1.3.2 Mengidentifikasi dampak digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi pembacanya mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dengan adanya analisis dampak digitalisasi desa wisata. Selain itu menjadi bahan kajian berikutnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atau kajian serupa.

- b. Kedua, temuan penelitian tentang *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dengan adanya analisis dampak digitalisasi desa wisata dimaksudkan untuk memberikan landasan teori untuk analisis pengembangan teori lebih lanjut kemudian dapat menjadi peluang untuk mencari solusi dari permasalahan pengembangan desa wisata dalam menunjang pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang lebih optimal dengan menerapkan digitalisasi melalui *collaborative governance*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata dan menerangkan dampak dari digitalisasi desa wisata serta mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga harapannya mampu benar-benar tepat sasaran implikasinya terhadap desa wisata lainnya untuk dapat lebih optimal dalam pengelolaan digitalisasi sehingga dapat mencapai pariwisata yang sukses dan berkelanjutan.
- b. Bagi perguruan tinggi, menambah kajian penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata serta dampak dari digitalisasi desa wisata sekaligus memperkaya literatur mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata untuk melakukan pengembangan digitalisasi.
- c. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumber bacaan dengan informasi yang bermanfaat, referensi dan pemahaman terkait pengelolaan desa wisata dengan memanfaatkan

digitalisasi sebagai strategi pengembangan wisata melalui *collaborative governance* untuk memajukan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini peneliti menjadikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan seperti dalam hal teori maupun metode penelitian sebagai acuan perbandingan dan pendukung untuk mengkaji lebih dalam mengenai teori yang selaras dan berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Hasil penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai bahan analisis mengenai apakah ada persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian baik penelitian yang sudah ada sebelumnya maupun penelitian yang akan dibuat kemudian juga nantinya akan dapat dikembangkan bagi peneliti berikutnya.

*Pertama*, penelitian Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022) yang berjudul “*Collaborative Process* dalam Pengelolaan Desa Wisata”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan wisata di Kabupaten Maros melalui salah satu indikator dalam *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Proses kolaborasi yang terjadi di Kabupaten Maros dimulai dari adanya musyawarah desa yang melibatkan berbagai aktor diantaranya pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) selalu pengelola wisata di desa tersebut, dan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut kemudian dihasilkan pembagian peran dan juga tanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan wisata melalui pembuatan

MoU untuk jangka panjang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *collaborative governance* wisata di Kabupaten Maros belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari beberapa indikator dari teori yang digunakan dalam penelitian belum terpenuhi atau belum terlaksana dengan baik, salah satu faktornya yaitu karena beberapa aktor masih belum optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola wisata (Bachtiar, Tamrin, Prilasandi, & Rafliansyah, 2022).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022) yang berjudul “*Collaborative Process* dalam Pengelolaan Desa Wisata” dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash yang akan digunakan untuk mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata. Kemudian, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian yang dipakai dimana penelitian dari Bachtiar, Saddam, dkk (2022) mengangkat objek wisata di Kabupaten Maros sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kabupaten Gunungkidul.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *collaborative governance* dan juga faktor apa saja yang menunjang keberhasilan dalam pengelolaan Desa Wisata Kemetul. Penelitian ini menggunakan teori dari Ansell dan Gash sebagai acuan

untuk mengidentifikasi *collaborative governance* di Desa Wisata Kemetul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul belum terealisasi dengan baik karena masih menemukan beberapa kendala seperti ketidakjelasan dalam aturan, pemahaman Bersama dan komitmen dari para *stakeholder*. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul yaitu kepercayaan dari setiap partisipasi, akses terhadap kekuasaan, dan adanya akses terhadap sumber daya (Utami, Hariani, & Sulandari, 2021).

Persamaan penelitian yang dilakukan Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tujuan penelitian yang sama-sama ingin mengidentifikasi pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata dan juga menggunakan teori dari Ansell dan Gash sebagai acuan dalam proses pengidentifikasian tersebut. Sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian yang akan dibuat untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan *collaborative governance*. Kemudian, perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian yang dilakukan di daerah yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Wisata Kemetul sedangkan penelitian selanjutnya dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul. Penelitian selanjutnya juga lebih terfokus pada pengembangan digitalisasi yang sudah dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran melalui *collaborative governance*.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022) dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah lebih dalam terkait pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Wisata Gubugklakah dan juga untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dari penerapan kolaborasi yang dilakukan. Dalam menelaah *collaborative governance* penelitian ini juga menggunakan acuan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Dimana konsep *collaborative governance* ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang kompleks sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai aktor didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses *collaborative governance* di Desa Wisata Gubugklakah dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya, tatap muka antar aktor, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses dan memunculkan pemahaman Bersama. Proses kolaborasi yang ada berhasil terlaksana dengan baik dengan adanya beberapa faktor pendukung didalamnya (Akbar, Supriyono, & Domai, 2022).

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menelaah penerapan *collaborative governance* di Desa Wisata. Dimana digunakan beberapa indikator dari teori Ansell dan Gash mengenai *collaborative governance* untuk menelaah lebih dalam terkait proses kolaborasi di Desa Wisata. Disisi lain, perbedaan penelitian ini berada pada objek yang digunakan dalam penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Wisata Gubugklakah, sedangkan penelitian yang akan dibuat dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten

Gunungkidul. Dan perbedaan kedua penelitian ini ada pada tujuan identifikasi *collaborative governance*, dimana penelitian yang akan dilakukan mengidentifikasi *collaborative governance* dalam hal pengembangan digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran, lebih spesifik meneliti kolaborasi dalam hal pengembangan digitalisasi yang dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Perangin-Angin, M. S. B., dan Hardianto, F. N. (2023) yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Pendekatan AHP”, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis prioritas dari strategi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa aktor yang menjadi sampel diantaranya pengelola Desa Wissta Nglanggeran, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa dan juga akademisi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dimana terdapat beberapa Langkah dalam metode ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pihak pendukung dalam keberhasilan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berdasarkan skor yaitu pada posisi pertama masyarakat desa setempat yang memiliki skor 0,272 kemudian yang kedua pemerintah beserta dinas terkait yang memiliki skor 0,253, selanjutnya posisi ketiga adalah pengelola desa wisata nglanggeran dengan skor 0,226, serta pihak akademisi pada posisi keempat dengan skor 0,175 dan yang terakhir adalah pihak media sosial yang memiliki skor 0.073. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terdapat beberapa pihak yang terlibat dan memiliki perannya masing-masing untuk menunjang keberhasilan pengembangan wisata, terlihat dari skor dari setiap pihak yang berbeda-beda

menunjukkan setiap pihak memiliki skor penilaian peran yang penting (Perangin-Angin & Hardianto, 2023).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian yang dilakukan dimana penelitian yang akan dilakukan akan lebih spesifik menganalisis peran dari setiap pihak atau yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) artinya dalam digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran. Penelitian ini akan menunjukkan proses *collaborative governance* dalam pengembangan digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran. Sedangkan penelitian sebelumnya secara general mengidentifikasi pengembangan Desa Wisata dalam berbagai aspek dan lebih menganalisis strategi dalam pengembangan desa wisata. Kemudian persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada objek penelitian yang sama-sama dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul.

## **1.5.2 Kerangka Teori**

### **1.5.2.1 Collaborative Governance**

Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa aktor, baik antar organisasi atau komunitas, para pemangku kepentingan maupun lembaga sebagai upaya dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Ansell dan Gash (2008) *collaborative governance* merupakan suatu pendekatan dalam manajemen kebijakan yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pembuatan keputusan dan

pelaksanaan kebijakan (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative governance* menawarkan alternatif yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks masalah-masalah kompleks yang memerlukan berbagai perspektif dan pengetahuan. Model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash didorong dari adanya beberapa hal antara lain, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan visi yang ingin dicapai bersama, adanya kerjasama yang telah dilakukan, menjaga kerjasama yang sedang dijalankan, adanya kepercayaan dari masing-masing pemegang kepentingan, kemudian juga ketidakseimbangan kapasitas sumber daya dan pengetahuan.

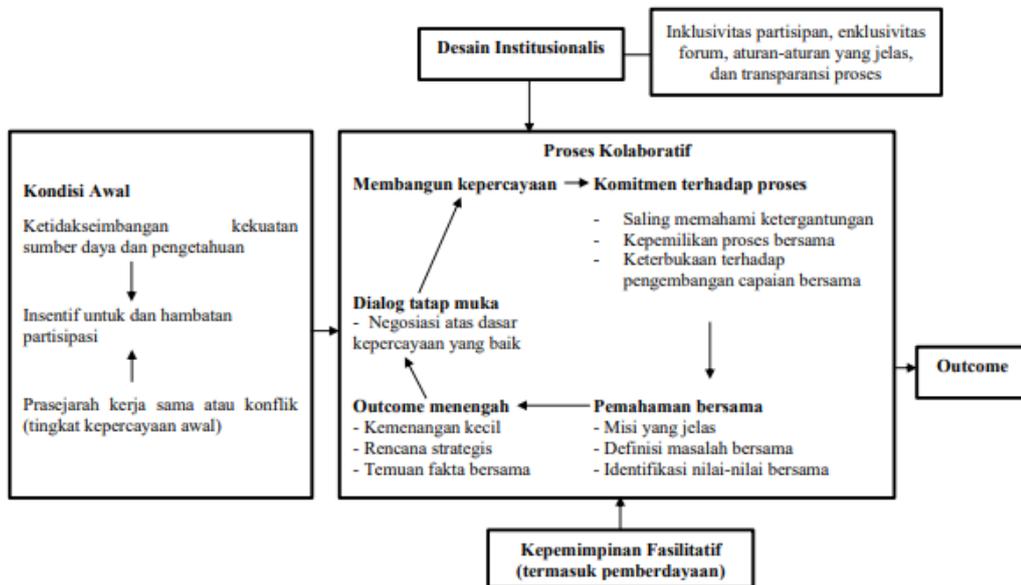
Konsep *collaborative governance* digunakan sebagai respon dari adanya permasalahan-permasalahan yang bersifat kompleks dan dinamis, sehingga akan sangat tidak mungkin apabila hanya diselesaikan oleh satu pihak yaitu pemerintah, namun perlu adanya sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. Kolaborasi merupakan bentuk dari kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dari beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima dampak dan manfaat (Haryono, 2012). Kolaborasi menurut Gray didefinisikan sebagai bentuk kerjasama dengan membagi tugas dan tanggung jawab untuk setiap pihak yang terlibat untuk dapat mencapai tujuan dan persepsi yang sama. Dengan *collaborative governance* ini dapat mendorong adanya sifat adaptif terhadap suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh beberapa pihak melalui berbagai bentuk *collaborative governance* seperti komunikasi, keterlibatan masyarakat, negosiasi, manajemen,

regulasi, serta bentuk kolaborasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan (Haryono, 2012).

*Collaborative governance* merupakan bentuk keterlibatan pemerintah dan swasta dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. *Collaborative governance* juga dapat menggambarkan keadaan yang saling membutuhkan antar pihak. Munculnya *collaborative governance* karena adanya kesadaran bahwa setiap aktor memiliki keterbatasan yang mana perlu adanya keterlibatan atau bantuan dari aktor lain.

*Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash adalah suatu konsep penting dalam studi kebijakan publik dan ilmu sosial yang menggambarkan pendekatan kolaboratif dalam proses pembuatan keputusan publik. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok lainnya dalam mengatasi isu-isu kompleks dan mendesak dalam masyarakat. *Collaborative governance* memfokuskan perhatiannya pada bagaimana kolaborasi tersebut dapat membentuk kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adil. Berikut model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash:

**Gambar 1.1** Model *Collaborative governance* Ansell dan Gash 2008



Sumber: Ansell dan Gash 2008

Model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) adalah sebuah kerangka kerja yang menguraikan alur atau tahapan yang terlibat dalam proses kolaboratif dalam pembuatan kebijakan. Model ini membantu dalam memahami bagaimana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatasi masalah kebijakan yang kompleks.

Ansell dan Gash (2008) mengembangkan sebuah kerangka kerja yang memecah *collaborative governance* menjadi empat dimensi utama yang dapat dilihat di gambar, yaitu kondisi awal (*starting condition*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), desain kelembagaan (*institutional design*) dan proses kolaborasi. Kondisi awal (*starting conditions*), dimensi ini mengacu pada faktor-faktor yang ada sebelum kolaborasi dimulai. Ini termasuk masalah atau tantangan yang dihadapi, sumber daya yang tersedia, kepentingan berbagai pihak, tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta sejarah hubungan antara

mereka. Kondisi awal yang baik dapat menciptakan landasan yang kuat untuk kolaborasi yang berhasil. Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), kepemimpinan dalam konteks *collaborative governance* bukan hanya tentang kekuasaan atau otoritas, tetapi juga tentang kemampuan untuk memfasilitasi dialog, mengelola konflik, dan memotivasi pihak-pihak yang terlibat. Pemimpin dalam kolaborasi harus bersifat inklusif, mendengarkan semua pihak, dan mempromosikan komunikasi yang terbuka. Desain kelembagaan (*institutional design*), dimensi ini berkaitan dengan aturan dasar dalam proses kolaborasi, berkaitan dengan bagaimana struktur dan mekanisme kolaborasi dibentuk. Ini mencakup pembentukan lembaga atau forum kolaborasi, peraturan dan perjanjian yang mengatur kerja sama, serta mekanisme untuk mengatasi konflik dan mengambil keputusan bersama. Aturan dasar yang jelas dan transparansi menjadi bagian penting dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan yang tepat dapat memfasilitasi kolaborasi yang efektif.

Proses Kolaborasi (*collaborative process*), dimensi ini mengacu pada cara pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini mencakup tahapan kolaborasi, alat komunikasi, pengumpulan data, analisis kebijakan, dan implementasi keputusan bersama. Proses kolaborasi yang baik akan memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi secara efektif dan merasa memiliki peran dalam kesuksesan kolaborasi. Dengan memperhatikan keempat dimensi ini, pemangku kepentingan dan praktisi dalam *collaborative governance* dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi upaya kolaboratif mereka dengan lebih efektif.

Empat dimensi sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya *collaborative governance*, sedangkan terdapat indikator dalam proses kolaborasi itu sendiri. Terdapat lima (5) indikator dalam proses *collaborative governance* yang saling memiliki keterkaitan. Berikut adalah proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008):

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Tahap awal dari proses kolaborasi ini adalah memfasilitasi dialog tatap muka antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam masalah kebijakan yang kompleks. Dialog ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi, menyatakan pandangan, dan mengidentifikasi isu-isu utama. Komunikasi langsung seperti ini membantu dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara pemangku kepentingan.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Pembangunan kepercayaan adalah unsur kunci dalam kolaborasi. Selama dialog tatap muka awal, pemangku kepentingan perlu membangun rasa saling percaya satu sama lain. Ini dapat dicapai melalui pembentukan hubungan personal, pertukaran informasi yang jujur, dan berkomitmen untuk memahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Kepercayaan yang kuat menjadi dasar untuk keberhasilan kolaborasi.

3. Komitmen untuk Memproses (*Commitment to Process*)

Tahap selanjutnya adalah menciptakan komitmen bersama untuk melanjutkan proses kolaborasi. Pemangku kepentingan harus setuju untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini dan untuk tetap terlibat dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Komitmen ini menciptakan dasar untuk kerja sama yang berkelanjutan dan untuk mencapai hasil yang bermakna.

4. Berbagi Pemahaman (*Sharing Understanding*)

Setelah kepercayaan dibangun dan komitmen tercapai, pemangku kepentingan perlu berbagi pemahaman mereka tentang masalah kebijakan yang sedang dihadapi. Ini melibatkan berdiskusi mendalam tentang isu-isu kunci, data yang relevan, dan berbagai pandangan yang ada. Pada tahap ini, pemangku kepentingan berusaha untuk memahami perspektif masing-masing dan mencapai pemahaman bersama tentang akar masalah dan solusi yang mungkin.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Selama proses kolaborasi, berbagai tahapan dapat menghasilkan hasil sementara atau *intermediate*. Ini dapat mencakup kesepakatan awal tentang langkah kebijakan, rencana atau konkret lainnya yang diambil oleh pemangku kepentingan. Hasil sementara ini mencerminkan kemajuan dalam mencapai tujuan kolaboratif. Hal ini juga dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk menilai efektivitas kolaborasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

Model *Collaborative Governance* ini menekankan pentingnya partisipasi, komunikasi terbuka, dan kerja sama dalam pengambilan keputusan kebijakan. Ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara efektif untuk mengatasi masalah yang kompleks dan mendesak dalam masyarakat.

#### **1.5.2.2 Digital Tourism sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata**

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang diuntungkan dengan maraknya inovasi digital yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi saat ini, khususnya dalam bentuk inovasi pengembangan produk layanan wisata (Kusumastuti, Handoko, & Wijaya, 2022). Digitalisasi pariwisata dinilai sebagai strategi yang tepat untuk menyikapi perubahan tatanan kehidupan di masyarakat yang semakin modern dengan berorientasi pada digital. Munculnya era digital, penggunaan internet memiliki efek yang luas pada banyak bidang kehidupan manusia, termasuk pariwisata yang mengarah ke pergeseran dari kebiasaan melakukan pemesanan dalam berwisata secara konvensional beralih ke penggunaan media digital (Megantara & Suryani, 2016).

Pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari modernisasi pariwisata. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi akan mendorong produsen dan konsumen untuk menyempurnakan metode interaksi mereka dan mendorong tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Masa depan membutuhkan kemampuan untuk secara aktif mengembangkan produk pariwisata melalui pemanfaatan digital (Mumtaz & Karmillah, 2021).

Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pariwisata dikenal dengan *digital tourism*. *Digital tourism* merupakan integrasi antara perkembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan industri pariwisata. Konsep *digital tourism* ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi di sektor pariwisata, menyediakan berbagai layanan pariwisata kepada pelanggan, dan membuat proses pemasaran pariwisata menjadi lebih mudah diakses melalui media digital atau secara online (Yanti, 2019). Implementasi digitalisasi di destinasi pariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.12 Tahun 2020 (Permenparekraf), dikatakan dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi tentang destinasi pariwisata di desa wisata. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara, pengelola, dan para pengunjung.

Digitalisasi sektor pariwisata dalam pengembangan desa wisata dapat mengubah bisnis pariwisata tersebut agar lebih efisien, efektif, dan optimal. Salah satu metode untuk mendukung promosi dan digitalisasi informasi di desa wisata adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan dengan cara memudahkan distribusi informasi kepada calon wisatawan yang berpotensi untuk mengunjungi destinasi di desa wisata tersebut.

Beberapa dampak dari *digital tourism* atau digitalisasi dalam pariwisata yang penulis temukan dari berbagai hasil penelitian, antara lain:

1. Digitalisasi sektor pariwisata memiliki dampak sosial, dimana menciptakan lapangan kerja dan daya saing yang berkelanjutan (Ernawati & Hananto, 2023).

2. Adanya *digital tourism* memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat melalui kunjungan para wisatawan (Simamora, 2023)
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor pariwisata (*digital tourism*) memiliki dampak positif pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara (Laba, Semara, & Tunjungsari, 2018).
4. *Digital tourism* memiliki dampak pada meningkatnya pemasaran destinasi (Murti, Kusumastuti, Handoko, & Wijaya, 2022)

Beberapa strategi pengembangan desa wisata melalui *digital tourism* (Simamora, 2023):

- a. Penggunaan Media sosial, media sosial digunakan sebagai sarana mempromosikan desa wisata untuk menarik minat wisatawan terhadap potensi yang dimiliki desa wisata dan menawarkan event-event yang digelar oleh masyarakat.
- b. Adanya Website, website juga menjadi media iklan untuk pariwisata desa dan sebagai media informasi untuk menawarkan produk-produk atau paket wisata yang disediakan desa wisata tersebut.
- c. Pemanfaatan *e-commerce*, *e-commerce* ini ditekankan untuk menjual produk yang dihasilkan masyarakat di kawasan wisata.

Digitalisasi dalam pariwisata memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis di sektor pariwisata dan bagi para wisatawan atau pengunjung. Bagi pengusaha pariwisata, digitalisasi memiliki manfaat dalam beberapa aspek, yaitu

meningkatkan efisiensi dan pengelolaan kapasitas perusahaan, memungkinkan interaksi yang efektif serta promosi produk. Sementara bagi wisatawan atau pengunjung, manfaat digitalisasi yaitu penghematan waktu, energi, dan biaya, akses informasi mengenai destinasi wisata, penawaran beragam produk wisata, ide untuk berbagai kegiatan wisata, memperoleh gambaran tentang destinasi wisata, serta memudahkan dalam proses pemesanan atau reservasi (Marwan, 2020).

## **1.6 Kerangka Berpikir**

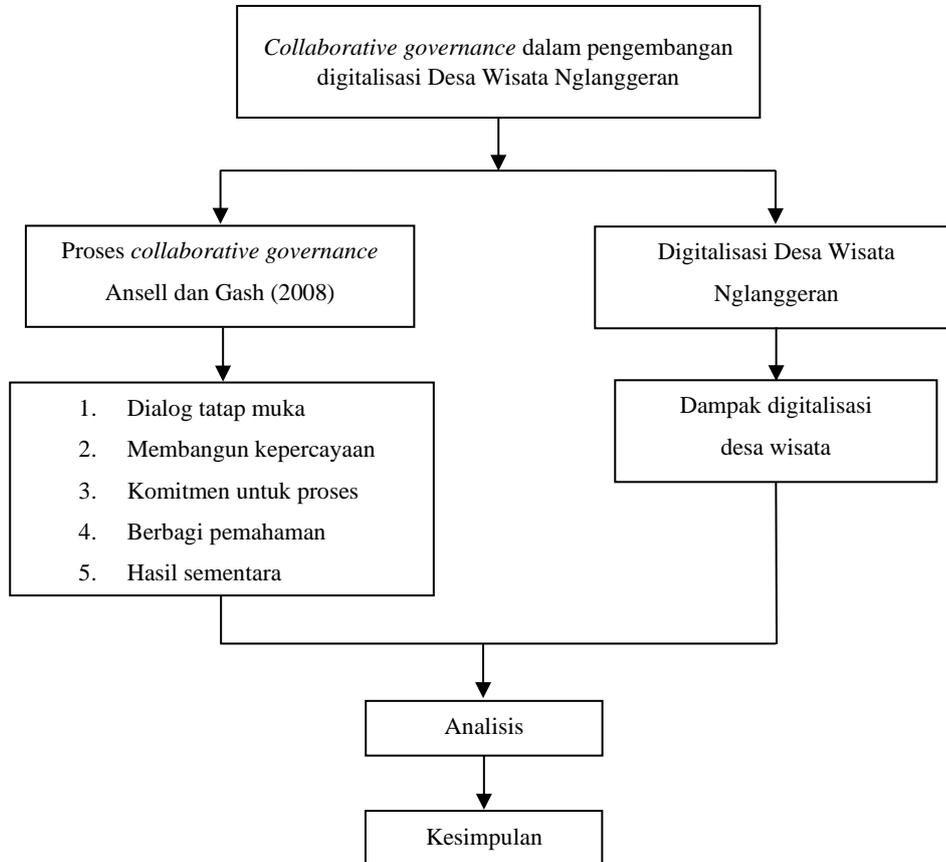
Mengacu pada konsep *collaborative governance* yang merupakan suatu upaya kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, dan swasta yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Kerangka berpikir ini didasarkan pada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan fokus dalam penelitian ini sebagai pedoman untuk mengukur kesesuaian dalam teori yang digunakan dengan keadaan nyata di lapangan, sehingga nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam kerangka berpikir ini peneliti akan menjelaskan objek penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.

Perkembangan Desa Wisata Nglanggeran yang begitu pesat dengan adanya strategi pemasaran melalui digital yang mampu membuat desa wisata tersebut sukses dan berkelanjutan. Keberhasilan pengembangan digitalisasi dan pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran tidak lepas dari adanya *collaborative governance* dimana terdapat peran dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana *collaborative governance* di Desa Wisata

Nglanggeran dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini menggunakan teori tersebut karena peneliti menganggap teori ini sudah tepat dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai proses *collaborative governance* yang dijalankan di Desa Wisata Nglanggeran. Beberapa proses yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang diambil dari teori Ansell dan Gash, yaitu dialog tatap muka (*face to face dialog*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen untuk memproses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*share understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Selain itu, peneliti akan mengidentifikasi dampak dari digitalisasi desa wisata yang dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran dengan menjadikan aspek pemanfaatan teknologi digital dalam pariwisata pada Peraturan Kemenparekraf No.12 Tahun 2020 sebagai acuan serta melihat implementasi digitalisasi di lapangan yang telah dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran. Untuk mempermudah peneliti dalam memahami pokok-pokok pikiran dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka berpikir seperti dibawah ini:

**Gambar 1.2** Kerangka Berpikir



### 1.7 Argumen Peneliti

Proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab dari setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Dalam proses kolaborasi terdapat indikator yang harus tepenuhi seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, berbagai pemahaman, komitmen pada proses, dan hasil sementara. Kelima indikator tersebut penting dalam mengukur proses kolaborasi yang dijalankan. Selain proses kolaborasi yang harus berjalan sistematis, perlu strategi dalam pengembangan desa wisata seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi desa wisata.

Implementasi *collaborative governance* yang baik dapat berupa sinergi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dilakukan dengan terorganisir. Setiap aktor perlu berkontribusi menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kolaborasi dan digitalisasi desa menjadi strategi utama dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, jika dilakukan dengan baik akan memberikan dampak positif yang signifikan baik dari aspek ekonomi dan aspek sosial.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan seluruh proses yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata” yaitu kualitatif. Studi kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor, mengumpulkan informasi deskriptif dari sumber seperti kata-kata dan tindakan partisipan sendiri (Moleong, 2013).

Proses kontak percakapan yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti diprioritaskan dalam penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Kusuma dan Darwanto (2015). Penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2010) adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimentasi) dimana peneliti sebagai alat kuncinya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) induktif, analisis data, dan temuan penelitian ditarik dengan cara yang

konsisten dengan tujuan penelitian. Temuan ini bersifat kualitatif, memberi bobot lebih besar pada signifikansi daripada generalisasi yang luas.

Kajian ini berupaya dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan situasi aktual yang dialami di lapangan, dan dilakukan analisis mendalam untuk melihat setiap fenomena. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada pengembangan topik penelitian yang memungkinkan mereka untuk melakukan observasi langsung secara mendalam. Dengan memperhatikan beberapa indikator proses dalam *collaborative governance*, peneliti dalam penelitian ini berupaya memberikan analisis secara detail mengenai proses *collaborative governance* dalam pengembangan digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran dan dampak digitalisasi desa wisata melalui gambaran situasi aktual yang terjadi di lapangan.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Istilah situs penelitian mengacu pada lokasi fisik di mana subjek penelitian berada dan di mana peneliti dapat mengumpulkan atau mendapatkan akses ke data, informasi, dan fakta yang relevan. Menempatkan lokasi studi secara tepat akan memudahkan penelitian dan pengumpulan data. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Patuk tepatnya di Desa Wisata Nglanggeran. Pemilihan desa didasarkan pada peneliti yang hendak mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan dampak digitalisasi desa wisata.

### 1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan yang dibutuhkan peneliti adalah seorang atau sekelompok yang benar-benar paham terkait persoalan yang akan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini memerlukan subjek yang memahami dan terlibat secara langsung dalam *collaborative governance* di Desa Wisata Nglanggeran dan pihak yang merasakan dampak dari digitalisasi yang dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran. Dari subjek tersebut selanjutnya akan diperoleh informasi dan data melalui wawancara dan observasi yang dapat mendukung dalam memahami topik pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian yang meliputi:

1. Sudjarwono, S.H selaku Sub. Koordinator Kelembagaan bidang pengembangan destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, pengambilan data bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, pada 13 November 2023.
2. Widada selaku Kepala Desa Nglanggeran, pengambilan data bertempat di Kantor Kalurahan Nglanggeran pada 14 November 2023.
3. Lilik Suharyanto selaku Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)/ pengelola Desa Wisata Nglanggeran, pengambilan data bertempat di sekretariat Pokdarwis Nglanggeran pada 14 November 2023.
4. Ary S. Suhandi selaku Founder dan Direktur NGO Indecon (Indonesian Ecotourism Network), pengambilan data melalui daring via zoom meeting pada 20 November 2023.

5. Atika Ari Nursafitri selaku masyarakat mewakili pelaku usaha Griya Coklat Nglanggeran, pengambilan data bertempat di Griya Coklat Nglanggeran pada 14 November 2023.
6. Iva Kurniawati selaku masyarakat mewakili pelaku usaha Griya Spa, pengambilan data melalui daring via whatApps pada 15 November 2023.
7. Eka Sumari selaku masyarakat mewakili pelaku usaha Griya Batik, pengambilan data melalui daring via zoom meeting pada 17 November 2023.
8. Pihak swasta yaitu Perusahaan Grup Putri Kedaton dan Agen Perjalanan Traveloka, penulis telah berusaha untuk melakukan wawancara tetapi penulis memiliki keterbatasan akses sehingga penulis tidak dapat melakukan wawancara secara langsung dengan informan kunci yaitu pihak Grup Putri Kedaton dan Traveloka. Oleh karena itu, penulis menggunakan data wawancara dari informan pendukung.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan data berupa teks atau kata tertulis yang berasal dari wawancara yang dikembangkan dengan interpretasi peneliti untuk mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan dampak dari implementasi konsep *digital tourism* atau digitalisasi desa wisata. Data hasil

wawancara didukung dengan temuan dalam proses pengamatan dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber-sumber informasi tersebut digunakan untuk menyusun data yang digunakan dalam analisis penelitian ini, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari narasumber atau objek yang sedang diamati. Data dapat dikumpulkan langsung dari subjek penelitian atau dari lapangan (Pabundu, 2006). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian secara langsung. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Nglanggeran, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO, masyarakat pelaku usaha dan pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran agar peneliti lebih mengetahui secara mendalam mengenai pengembangan Desa Wisata Nglanggeran melalui proses *collaborative governance* serta dampak dari penerapan digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan mengacu pada informasi yang dikumpulkan tentang topik penelitian dari sumber luar seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, makalah, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melakukan tiga (3) tahapan dalam pengumpulan data. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada saat peneliti melakukan pengambilan data di instansi tersebut. Peneliti juga melakukan pengamatan pada Desa Wisata Nglanggeran sebagai lokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui situasi, tindakan, dan sinkronisasi dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada subjek penelitian.

b. Wawancara (*indepth interview*)

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada 7 (tujuh) subjek penelitian yang terdiri dari Sub. Koordinator bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Nglanggeran, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Nglanggeran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO Indecon, pelaku usaha Griya Coklat, pelaku usaha Griya Spa, dan pelaku usaha Griya Batik. Peneliti melakukan wawancara pada sektor terkait dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran untuk menjawab proses kolaborasi yang dilakukan dalam proses pengembangan dan mendapatkan temuan bervariasi. Maksud dari temuan yang bervariasi adalah apakah tiap subjek memiliki jawaban yang berbeda dengan dibuktikan dalam

pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keabsahan data.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan proses dokumentasi untuk memperdalam dan memperjelas data yang akan diambil yang kemudian memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi teori dan metode yang relevan dalam penelitian dengan pengumpulan data secara lengkap, efektif, dan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang dibahas merupakan bagian integral dari metode penelitian berbasis dokumen yang digunakan untuk merumuskan kesimpulan tertulis yang beralasan (Maelani, 2015). Dokumen yang mendukung dalam temuan data, antara lain: Gambar dari postingan media sosial dari para pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi seperti pihak Pokdarwis, NGO Indecon, Universitas Pancasila, dan dari pihak pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; dan laporan rekapitulasi jumlah kunjungan wisata dan jumlah penghasilan dari Desa Wisata Nglanggeran; dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *collaborative governance* dan digitalisasi desa wisata.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dari model Miles dan Huberman, adapun beberapa tahapan untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu metode untuk mempertajam dan mengkategorikan data, serta menuntun dan menyingkirkan informasi yang berlebihan, serta mengelola informasi untuk sampai pada kesimpulan dan memastikan keakuratannya. Setiap masalah dijelaskan secara singkat dalam hal langkah-langkah yang diambil untuk melakukan analisis. Hapus atau ubah informasi yang tidak relevan dan urutkan data yang dikumpulkan sehingga kesimpulan dapat ditarik (Rijali, 2018).

### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan seperangkat teknik pengorganisasian data yang mendorong peneliti untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengidentifikasi pola yang signifikan dan memberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan yang sesuai (Milles & Huberman, 1992).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah elemen penting dalam keseluruhan proses penyiapan. Kesimpulan terbentuk karena peneliti menghasilkan arah sebab akibat, catatan, ide, konfigurasi, proposisi yang berbeda, dan suatu pola yang keseluruhannya dianalisis oleh objek yang diteliti (Milles & Huberman, 1992). Kesimpulan yang dihasilkan merupakan suatu hasil penelitian yang memberikan jawaban atas prioritas penelitian melalui penggunaan analisis data. Argumen narasumber didukung atau diperluas dengan menjelaskan data yang dikumpulkan dari wawancara secara rinci, sesuai pedoman wawancara.